REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Penelitian

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.[1]

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan untuk membangun serta meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki seseorang agar dapat mengaktualilasikan diri di dalam masyarakat. Kemudian masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.

Dari pengertian di atas, dapat di fahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

[1] Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI,(Malang 2009), hlm.17

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adapun definisi dari para ahli tentang kata pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1) Soetopo mendefinisikan pemberdayaan sebagai faktor yang menjadi dasar pengembangan untuk mengembangkan potensi membantu masyarakat membentuk kelompok.[2]
2) Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai pemberian kesempatan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat untuk memajukan taraf hidup yang lebih sejahtera.[3]
3) Menurut Cook dan Macualy, pemberdayaan adalah perubahan filosofi manajemen yang membantu menciptakan lingkungan di mana individu dapat menggunakan keterampilan dan energi mereka untuk mencapai tujuan organisasi.
4) Menurut Clutterbuck, pemberdayaan mendorong individu untuk memperbaiki cara mereka melakukan pekerjaannya dan memikul tanggung jawab pribadi atas upaya mereka untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, dan upaya untuk memberikan izin.[4]
5) Menurut Totok Mardikanto dan rekannya Poerwoko Soebiato, pemberdayaan merupakan upaya masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dengan atau tanpa dukungan pihak lain.[5]

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses menciptakan program-program di daerah yang kekurangan atau tidak berdaya untuk meningkatkan

[2] Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 88-89.

[3] 7 Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam" Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.1 No.1 (2016): 60.

[4] Suparno Eko Widodo, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 201-202.

[5] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2015), 100.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

taraf hidup masyarakat melalui kemungkinan-kemungkinan yang ada di daerah tersebut.

b. Karakteristik Pemberdayaan Masyrakat

Konsep pemberdayaaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community - based development*). Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan, memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, dimana pembangunan partisipasif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari dalam pengaplikasiannya. Adapun menurut Rubin dalam Sumaryadi mengklasifikasikan bahwa ada 5 karakteristik atau prinsip pemberdayaan masyarakat, diantaranya:[6]

1) Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya;

[6] Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Citra Utama,2005). Hlm.93-94

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan;
3) Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik;
4) Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya;
5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah bersifat makro dengan kepentingan masyarakat bersifat mikro.

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik atau prinsip dari pemberdayaan masyarakat apabila dilaksanakan dengan baik pada tataran sistem, kelembagaan dan individu. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan kapasitas dalam upaya mengembangkan masyarakat pada tataran yang sama, yaitu tataran sistem, kelembagaan dan individu. Peningkatan kapasitas dalam tataran sistem meliputi usaha yang bersifat luas dan banyak menekankan keterlibatan pemerintah dan pemegang kekuasaan lainnya terutama dalam mengembangkan sebuah sistem pembangunan berpihak kepada masyarakat.

c. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori "ACTORS" tentang pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay lebih memandang mayarakat sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ide-ide, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya.[7]

Pemberdayaan yang dimaksudkan oleh Cook dan Macaulay lebih mengarah pada pendelegasian secara sosial dan etika/moral, antara lain:

1) mendorong adanya ketabahan;
2) Mendelegasikan wewenang sosial;
3) Mengatur kinerja;
4) Mengembangkan organisasi (baik lokal mapun eksteren);
5) Menawarkan kerjasama;
6) Berkomunikasi secara efesien;
7) Mendorong adanya inovasi; dan
8) Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.

Dengan menggunakan konsep pemberdayaan yang ditawarkan Cook dan Macaulay ini, maka perubahan yang akan dihasilkan merupakan suatu perubahan yang bersifat terencana karena input yang akan digunakan dalam perubahan telah diantisipasi sejak dini sehingga output yang akan dihasilkan mampu berdayaguna secara optimum. Kajian pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kerangka ACTORS, sebagai berikut:

1) A = *Authority*, kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk merubah pendirian atau semangat (etos kerja) menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu milik mereka sendiri. Dengan demikian mereka merasa perubahan yang dilakukan adalah hasil produk dari keinginan mereka untuk menuju perubahan yang lebih baik.
2) C = *confidence and competence*, menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan;

[7] Sarah Cook & Steve Macaulay. 1997. Perfect Empewermant. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) T = *trust*, menimbulkan keyakinan bahwa mereka mempunyai potensi untuk merubah dan mereka harus bisa (mampu) untuk merubahnya;
4) O= *Oppurtunities*, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri;
5) R = *Responsibilities*, dalam melakukan perubahan harus melalui pengelolaan sehingga dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk berubah menjadi lebih baik; dan
6) S= *Support*, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan lebih baik. Dalam hal ini dukungan yang diharapkan selain dari sisi ekonomis, sosial dan budaya juga dukungan dari berbagai stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) yang dilakukan secara simultan tanpa didominasi oleh salah satu pihak/faktor.

d. Metode Pemberdayaan Masyarakat

1) RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

Pemberdayaan masyarakat mulai dikembangkan oleh Chambers pada tahun 1970 dengan dikembangkannya *rapid rural appraisal* (RRA). Pada perkembangannya, RRA banyak mendapat kritikan, salah satunya adalah pengumpulan dan analisis data dilakukan oleh pihak luar. Oleh karena itu, pada tahun 1980 dikembangkan, yaitu pihak luar berperan sebagai fasilitator dan pelaksananya adalah masyarakat. Melalui metode PRA dapat diperoleh data situasi dan kondisi wilayah yang komprehensif sebagai dasar perencanaan kegiatan spesifik lokal. Akan tetapi, metode PRA hanya merupakan kegiatan analisis situasi awal, di mana belum ada perencanaan kegiatan, pelaksanaan maupun evaluasi, sehingga penerapannya diperlukan improvisasi dan modifikasi agar hasil analisis

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

situasi dapat dimanfaatkan untuk penerapan program.

2) PLA (*Participatory Learning And Action*).

Metode PLA lebih komprehensif dengan tahapan dari pembentukan tim, perencanaan kegiatan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, sehingga dapat dilaksanakan tanpa harus diimprovisasi maupun modifikasi. Akan tetapi fasilitator atau tim PLA merupakan pihak luar, yang dalam penerapannya bekerja sama dengan masyarakat setempat, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan lokasi kegiatan lebih besar.

e. Tujuan Pemberdayaan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan bidang-bidang kesejahteraan. Ada yang ingin memperkuat bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah menyadarkan masyarakat akan potensi, kekuatan, dan kemampuannya guna memperkuat masyarakat, memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup.[8]

Tujuan pemberdayaan masyarakat diupayakan agar impian dapat terwujud dalam masyarakat dan untuk menghidupkan kembali perekonomian. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pendidikan.

Dalam arti pemberdayaan harus direncanakan sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dicapai melalui pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metodologi, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan antara fasilitor dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting

[8] Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.1 No.1 (2016):60

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

adalah pendidikan yang mengedepankan semangat belajar.

2) Perbaikan tindakan.

Dengan berbekal pendidikan yang lebih baik dan peningkatan aksesibilitas serta sumber daya yang lebih beragam, diharapkan kinerja yang lebih baik.

3) Perbaikan kelembagaan

Dengan perbaikan / inisiatif yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan dalam usaha.

4) Pendapatan yang lebih baik

Dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pekerjaan.

5) Perbaikan lingkungan.

Peningkatan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena degradasi lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

6) Perbaikan masyarakat

Kondisi kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik seharusnya juga mengarah pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.[9]

f. Strategi Pemberdayaan Masyarakat.

Sebenarnya berbagai konsep dan program pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Diantaranya programprogram yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dijabarkan melalui program pembangunan sektoral, pembangunan regional, dan pembangunan khusus.

Pelaksanaan konsep ini memerlukan reorentasi pembangunan, gerakan sosial, institusi

[9] Totok Mardikanto dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta cv, 2015), 111-112

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lokal, dan pengembangan kapasitas. Hal ini didedikasikan kepada masyarakat untuk lebih mendapatkan kesempatan ikut serta dalam proses pembangunan adalah setiap warga masyarakat harus "Mampu" dan "Berdaya". Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya

Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya :

1) Strategi 1 yakni Menciptakan iklim.

   Memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ;

   a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (e*nabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
   b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (e*mpowering*).
   c) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.

2) Strategi 2 yakni strategi gotong royong.

   Melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas kekuatan sendiri dan kesukarelaan.

3) Strategi 3 yakni pembangunan Teknikal – Profesional

   Dalam memecahkan berbagai masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, prosedur baru

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini peranan agen-agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan dipercaya untuk menemukan cara-cara yang lebih kreatif sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir.

4) Strategi Konflik

Melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasasi oleh segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada perubahan oraganisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber daya dan keputusan masyarakat.

Adapun menurut Rudi ada tiga dasar didalam menyusun kegiatan untuk mengembangkan atau pemberdayaan masyarakat yaitu:[10]

1) Strategi empiris rasional yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa manusia adalah kebodohan dan tahyul. Manusia akan mengikuti akan kepentingan dirinya sendiri yang rasional. Manusia akan menerima perubahan jika perubahan itu dapat diterima dan dibenarkan secara rasional.

[10] Ayub M. *pandangaran, managemen proyek pengembangan masyarakat,(*universitas haluoleo: unhalul press,2011),hlm.38-39

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Strategi non reducatif yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa pola tindakan dan perilaku masyarakat didukung oleh norma- norma sosial budaya dan komitmen individu oleh sikap dan norma- norma.
3) Strategi kekuatan paksaan yaitu strategi yang d idasarkan pada asumsi bahwa manusia akan mengikuti keinginan dari pihak lain yang dipandang memiliki kekuasaan yang lebih besar pemenuhan kebutuhannya berada pada pihak tersebu. Masyarakat yang memiliki tingkat intelektual rendah dan situasi masyarakat yang anomi menurut peran yang lebih besar dari pengusaha untuk melakukan inisiatif dan pengaturan.

g. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Dalam melaksanakan program pemberdayaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

1) Pemberdayaan berlangsung secara demokratis dan menghindari paksaan. Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk pemberdayaan. Juga setiap orang memiliki kebutuhan, keterampilan, masalah, minat, dan peluang yang berbeda. Unsur paksaan harus dihindari, karena paksaan bukanlah ciri pemberdayaan.[11]
2) Sasaran pemberdayaan adalah subyek atau pelaku kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, metode dan bentuk kegiatan pemberdayaan.[12]
3) Pemberdayaan adalah proses yang memakan waktu, sehingga dilakukan bertahap dan secara terus menerus. Langkah ini dilakukan secara

[11] Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Temanggung :Desa Pustaka Indonesia, 2019) 38
[12] Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Temanggung :Desa Pustaka Indonesia, 2019) 38

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

logis dari hal yang sederhana menuju hal yang kompleks.[13]

4) Pemberdayaan berarti membangkitkan kembali nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, musyawarah mufakat dan kearifan lokal lainnya yang merupakan bagian dari identitas masyarakat harus dikembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.[14]
5) Pemberdayaan perempuan khususnya remaja dan ibu muda harus diperkuat karena potensinya besar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengentaskan kemiskinan.[15]

h. Tahap- tahap pemberdayaan.

Menurut Soekanto, pemberdayaan masyarakat meliputi tujuh langkah atau fase, antara lain:

1) Tahap persiapan

   Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam fase ini, yaitu yang pertama adalah pengalihan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh para pekerja masyarakat, dan yang kedua adalah penyiapan lapangan yang pada dasarnya berusaha dilakukan dengan cara non-direktif. .[16]
2) Langkah-langkah penilaian *(assessment)*

   Pada fase ini, proses evaluasi dapat dilakukan secara individual oleh kelompok masyarakat. Dalam hal ini, pekerja kasus harus

[13] Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Temanggung :Desa Pustaka Indonesia, 2019) 38

[14] Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Temanggung :Desa Pustaka Indonesia, 2019) 38

[15] Ajeng Dini Utami, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Temanggung :Desa Pustaka Indonesia, 2019) 38

[16] Arif Purbantara, Mujianto, *"Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa"*, https://undana.ac.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pd

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*know the needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.[17]

3) Program alternatif atau fase perencanaan tindakan

Pada fase ini, petugas yang menjadi agen perubahan mencoba secara partisipatif melibatkan warga dalam memikirkan permasalahan masyarakat dan cara penyelesaiannya.[18]

4) Tahapan formalisasi rencana aksi

Pada fase ini agen perubahan (*change agent*) membantu setiap kelompok, setiap kelompok merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di sisi lain, panitera juga membantu memformalkan gagasan masyarakat secara tertulis, terutama dalam hal hibah.[19]

5) Tahap implementasi

Program atau Kegiatan Dalam rangka melaksanakan program penguatan masyarakat, kader masyarakat diharapkan mampu melanjutkan program-program yang telah berjalan yang dikembangkan. Kerja sama antara petugas dan masyarakat penting pada tahap ini karena masalah yang direncanakan dengan baik dapat berubah di lapangan. [20]

---

[17] Arif Purbantara, Mujianto, *"Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa"*, https://undana.ac.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pd

[18] Arif Purbantara, Mujianto, *"Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa"*, https://undana.ac.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pd

[19] Arif Purbantara dkk, *Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa*, https://undana.ac.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf.

[20] Arif Purbantara dkk, *Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa*, https://undana.ac.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

6) Tahap evaluasi

Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut aparat terhadap program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat yang menurut warga sedang berjalan.[21]

7) Tahap terminasi

Fase terakhir adalah fase di mana hubungan dengan masyarakat sasaran secara formal diakhiri. Di sinilah proyek diharapkan berakhir.[22]

i. Langkah- langkah pemberdayaan

Salah satu dari langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan nilai dan prestise adalah pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan berbasis kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan suatu konsep agar suatu perekonomian dapat berjalan dengan baik, sehingga keinginan masyarakat harus ada dalam kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat.[23]

Individu yang diberdayakan harus membentuk organisasinya sendiri untuk memimpin dan mengarahkan proses pemberdayaan. Memberi orang luar kontrol atas pelaksanaan otoritas dapat menyebabkan ketergantungan dan bahkan mencegah pengembangan otoritas yang diinginkan. [24]Allah berfirman:

---

[21] Arif Purbantara dkk, *Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa*, https://undana.ac.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf

[22] Arif Purbantara dkk, *Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa*, https://undana.ac.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf

[23] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik" (Bandung: Alfabeta, 2015), 111-112.

[24] Moeljadi & Pramono, "Exploring of coastal communities and economic empowermen to the environment impact in maritime", Journal of Management and Business Research (2018): 223-231

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٍ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ١١

Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia"[25]

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan dan martabat masyarakat kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Masyarakat diminta untuk berusaha meningkatkan kompetensinya dan bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri. Ayat ini juga mendorong rasa percaya diri dalam jiwa masyarakat. Tujuan pemberdayaan adalah memberdayakan masyarakat dan masyarakat penerima untuk merubah nasib dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Tingkat pemberdayaan pertama adalah kesadaran dan keinginan untuk berubah.[26] Tanpa keinginan untuk memperbaiki diri, sulit bagi orang untuk meningkatkan taraf hidupnya.

[25] QS. Ar-Ra'd ayat 11, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 250

[26] Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Volume 21 No 2 (2012) 186

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

j. Pandangan Islam tentang pemberdayaan masyarakat

Islam memandang masyarakat sebagai suatu sistem di mana individu-individu saling membutuhkan dan mendukung. Ini adalah hubungan antara individu dalam masyarakat yang saling menguntungkan. Perbedaan pendapatan finansial merupakan potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keharmonisan dan persahabatan antar manusia. Islam mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan tiga prinsip utama, yaitu tiga prinsip yaitu prinsip ukhuwwah, prinsip ta'awun dan prinsip kesetaraan. Prinsip-prinsip ini dijelaskan di bawah ini.

1) Prinsip uhuwwah. Ukhuwwah berarti persaudaraan, prinsip ini menekankan bahwa semua Muslim saling terkait satu sama lain, meskipun tidak ada hubungan darah di antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin rasa empati dan mempererat persahabatan dalam masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada Firman Allah SWT [27]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." [28]

2) Kedua, prinsip ta'awun. Allah SWT menganjurkan manusia untuk saling membantu. Prinsip ta'awun, atau gotong royong, juga dapat diartikan sebagai sinergi antar pemangku kepentingan yang berbeda untuk mencapai

[27] Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an", Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 (2019) 35

[28] Q.S Al-Hujurat/49: 10

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses kolaboratif, sehingga semua pihak harus saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bukan tanggung jawab pihak tertentu, tetapi semua pihak terkait. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah sendirian tanpa sinergi dengan pihak lain. Dengan Ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, ulama, ormas Islam dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dapat bersinergi memadukan kekuatan finansial, kepemimpinan, sumber daya manusia, metodologi dan pengambilan keputusan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pemberdayaan. pengentasan kemiskinan. Firman Allah SWT:[29]

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."[30]

3) Ketiga, prinsip kesetaraan manusia. Dimana Islam telah memproklamasikan kesetaraan manusia 14 abad yang lalu.[31] Allah SWT berfirman:

[29] Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an", Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 (2019) 35

[30] QS. Al-Maidah ayat 2, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 106

[31] Ulfi Putra Sany, "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an", Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 (2019) 36

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[32]

2. Wisata Religi

a. Pengertian Wisata Religi.

Pada dasarnya pariwisata adalah suatu proses dimana satu orang atau lebih berpindah secara sementara ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Alasan kepergiannya bermacam-macam kepentingan, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan atau alasan lain seperti rasa ingin tahu, mencari pengalaman atau belajar. [33] Allah SWT telah berfirman dalam QS.An-Nahl: 36

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ

[32] QS. Al-Hujurat ayat 13, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 517

[33] Gamal Suwantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi,1997), 3

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ٣٦

Artinya: Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)[34]

Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Kepariwisataan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, antara lain:

1) Pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan diri, atau menjelajahi keunikan tempat tujuan wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.[35]
2) Pariwisata adalah kegiatan wisata yang beraneka ragam dan didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha pariwisata, pengelola dan masyarakat.[36]
3) Kepariwisataan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata secara keseluruhan, bersifat multidimensi dan multidisiplin, yang diwujudkan sebagai interaksi antara kebutuhan setiap orang dan setiap negara, serta antara wisatawan dengan masyarakat setempat,

[34] QS. An-Nahl ayat 36, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 271

[35] Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2009 atau UU Kepariwisataan

[36] Pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2009 atau UU Kepariwisataan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

wisatawan, negara, pemerintah daerah dan pengusaha .[37]

Sedangkan Hunziker dan Krapf dalam Kohdyat mengatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan fenomena dan hubungan yang diciptakan oleh perjalanan dan persinggahan orang-orang di luar tempat tinggalnya. Tujuannya bukan tempat tinggal tetap (di tempat tinggal) dan tidak terkait dengan pekerjaan berbayar.[38]

Pada dasarnya wisata religi merupakan perjalanan keagamaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sisi spiritual, agar jiwa yang kering kembali dibasahi dengan hikmah religi. Destinasi wisata religi sangat luas dan mencakup segala tempat yang dapat membangkitkan rasa religiusitas tersebut. Destinasi wisata religi mengedepankan keunikan, keindahan dan nilai religi. Misalnya mengunjungi masjid, bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain[39]

Menurut Suparlan menyatakan bahwa religi adalah sistem budaya. Pada hakekatnya agama sama dengan budaya, yaitu suatu sistem simbol atau pengetahuan yang menciptakan, mengklasifikasikan, menciptakan atau menyusun simbol-simbol dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan dan mengolah lingkungan. Sedangkan budaya adalah semua pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial dan yang isinya adalah perangkat, model pengetahuan, yang dapat digunakan secara tepat sasaran untuk memahami, menafsirkan, dan mempromosikan

[37] Pasal 1 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2009 atau UU Kepariwisataan

[38] Sripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Amin Triyanto, "Strategi Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Demak Menjadi Pusat Destinasi Wisata Religi", Universitas Negeri Semarang, 2019

[39] Sripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Amin Triyanto, "Strategi Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Demak Menjadi Pusat Destinasi Wisata Religi", Universitas Negeri Semarang, 2019

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lingkungan yang dilaluinya. dihadapi dan menciptakan aktivitas yang mereka butuhkan. [40]

Soetomo mengungkapkan bahwa istilah religi adalah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Oleh karena itu, wisata religi dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat masyarakat semakin yakin dengan keyakinannya atau sekedar membuktikannya.[41]

b. Fungsi Wisata Religi.

Wisata religi dilakukan untuk mendapatkan kasih sayang atau untuk belajar tentang ciptaan Allah atau sejarah peradaban manusia, membuka hati dan membangkitkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Ziarah ke kuburan yang syar'i dan menurut sunnah adalah ziarah ke kuburan dengan tujuan menasihati diri dan mengingat kematian. Banyak orang mengunjungi kuburan untuk menerima berkah. Berdoa kepada Shahibul Qubur (mengunjungi orang) adalah ziarah serius yang tidak dipandu oleh Nabi.[42]

Wisata pada hakekatnya adalah perjalanan untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Implementasinya dalam pariwisata terkait dengan proses dakwah menanamkan keyakinan akan adanya tanda-tanda kebesaran Allah sebagai bukti berupa ayat-ayat Al-Quran[43]

c. Manfaat Wisata Religi

---

[40]Suparlan, Supardi, "Pengetahuan budaya, Ilmu-Ilmu Sosial Dan Pengkajian
Masalah-Masalah Agama",Puslitbang Lektur Keagamaan (1981) 87

[41] Sripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Amin Triyanto, "Strategi Pengembangan Wisata Religi Kabupaten Demak Menjadi Pusat Destinasi Wisata Religi", Universitas Negeri Semarang, 2019

[42] Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Masriani, "Peran Wisatawan Dalam Meningkatkan Pendaptan Masyarakat Di Kawasan Wisata Religi Makam Syekh Yusuf Kabupaten Gowa", Universitas Muhammadiyah Makassar 2019

[43] Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Masriani, "Peran Wisatawan Dalam Meningkatkan Pendaptan Masyarakat Di Kawasan Wisata Religi Makam Syekh Yusuf Kabupaten Gowa", Universitas Muhammadiyah Makassar 2019

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pariwisata memiliki arti dan manfaat bagi masyarakat sekitar, antara lain penciptaan lapangan kerja, adanya peluang usaha, pertumbuhan pendapatan, pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan, serta semangat persatuan dan kesatuan. Berbagai macam pariwisata antara lain wisata budaya, wisata kesehatan, wisata olahraga, wisata bisnis, wisata industri, wisata politik, wisata tradisional, wisata sosial, wisata pertanian, wisata bahari, wisata konservasi alam.[44]

Wisata religi merupakan salah satu destinasi yang banyak diminati masyarakat saat ini karena wisata ini disebut juga wisata religi atau ziarah ke tempat-tempat suci dan makam tokoh-tokoh besar yang dianggap bersejarah. Wisata religi sebagian besar berkaitan dengan adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat.[45]

Dalam wisata ini, para wisatawan akan memperkaya pemahaman dan pengalaman religius serta rasa spiritual dari Yang Maha Kuasa. Terdapat istilah yang berbeda dalam wisata religi, diantaranya perjalanan wisata disebut juga dengan ziarah. Penyiar melakukan perjalanan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah untuk meningkatkan keyakinan mereka pada kematian manusia. Seperti perjalanan atau wisata, wisata religi juga membahas tujuan penting seperti selain jalan-jalan, wisatawan juga bisa memohon berkah dengan cara berdoa untuk sosok yang telah meninggal atau terlibat dalam masyarakat sekitar.

Jadi, tentu ada perbedaan yang dialami jemaah pada saat keberangkatan, di tempat atau kembali dari destinasi wisata religi. Peziarah

[44] Muhammad Fahrizal Anwar dkk, Analisis Dampak Pengembangan Wisata Religi Makam Sunan Malik Ibrahim dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Sekitar, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 44 No.1 (2017),hal. 187-188

[45] Mukhirto, Strategi Desa Gandukepuh terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi, *Jurnal of Community Developent and Disaster Management* Vol. 4 No. 1 (2022), 23

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memahami tempat itu karena sesampai di sana, para pemimpin rombongan menceritakan sekilas tentang biografi orang yang mereka kunjungi, sejarahnya, perjuangan dakwahnya, komitmen dan jejaknya, bahkan doa untuknya dalam perjalanan religi ini, peziarah mengumpulkan hikmah dan mencari berkah.[46]

B. Penelitian Terdahulu.

1. Penelitian yang ditulis oleh Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati dalam jurnal. Jurnal pemikiran dan penelitian sosiolog Vol. 2, No. 1, Desember 2017, dengan judul "*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya desa wisata, masyarakat dapat ikut mensukseskan program desa wisata. Pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Bumiaji telah mampu merubah sebagian besar masyarakat. Misalnya perubahan pengetahuan tentang bagaimana sebuah desa menjadi aset wisata yang mampu menghasilkan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan bantuan program pemberdayaan masyarakat, masyarakat juga memiliki keterampilan mengolah apel dan menawarkan homestay. Itu mempengaruhi pertumbuhan tingkat pendapatan penduduk kota Bumiaji.[47] Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang dampak ekonomi dari pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata berbasis potensi lokal. Sedangkan perbedaanya adalah mengenai fokus penelitian, dimana penelitian tersebut berfokus kepada dampak

[46] Moh Chotib, "Wisata Religi di Kabupaten Jember",*jurnal FENOMENA* Vol. 14 No. 2 (2015), hal 413 .Diakses pada tanggal 21Agustus 2022

[47] Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami, Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati, "*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji"* Jurnal pemikiran dan penelitian sosiolog Vol. 2, No. 1, Desember 2017: 67

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan potensi lokal dalam program desa wisata, sedangkan penelitian ini berfokus kepada dampak ekonomi masyarakat melalui wisata religi.

2. Penelitian yang ditulis oleh T. Popon Yuliansyaf, dalam skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 dengan judul "*Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Pada Desa Wisata Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)"*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Berdasarkan penelitian tentang dampak pengembangan desa wisata terhadap perekonomian nasional desa wisata Lubok Sukon, dapat disimpulkan bahwa model wisata desa wisata Lubok Sukon adalah model wisata tradisional, dengan mis. kearifan lokal, tata cara budaya Aceh khususnya Aceh Besar, sedangkan program pengembangan desa wisata Lubok Sukon berupa pelestarian rumah adat, kebersihan dan keunikan Aceh khususnya Aceh Besar. Peluang dan hambatan pengembangan desa wisata Lubok Sukon adalah sebagai berikut:sebuah. Potensi desa wisata Lubok Sukon terletak pada adat dan tradisi ritual keagamaan Islam, gotong royong, Kenduri Blang (persiapan saat kedatangan Saha), Maulid Nabi, Nuzulul Al-Qur'an, Peusijuek, Kenduri Meukawen (pesta pernikahan)). acara) dan kuliner khas Aceh. Sejak hasil pengembangan Lubok Sukon Graduate Village menjadi desa wisata, berdampak pada lingkungan dan masyarakat semakin menjaga keutuhan budaya, adat istiadat dan kebersihan. Namun dari segi ekonomi masih sedikit pengaruhnya, seperti: Kesempatan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat, perkembangan masyarakat dalam pengolahan dan promosi buatan tangan yang masih rendah. Selain itu, juga terbatas karena pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten dan dinas pariwisata kabupaten tidak memiliki kebijakan untuk mengembangkan dan mempromosikan pariwisata tradisional khususnya di

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

wilayah Aceh Besar.[48] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pemberdayaan berbasis potensi lokal melalui pariwisata dan dampaknya terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak kepada rumusan masalah, dimana penelitian tersebut terdapat model model dan program pengembangan desa wisata, sedangkan dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah dampak dan faktor penghambat serta pendukung pengelolaan desa wisata.

3. Penelitian yang ditulis oleh Neneng Komariah, Encang Saepudin, Pawit M. Yusup, dalam jurnal Jurnal Pariwisata Pesona Volume 03 No 2, Desember 2018, dengan judul. *"Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal".* Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus,dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan desa wisata pedesaan di Kabupaten Pangandaran tertuang dalam prinsip-prinsip organisasi. Organisasi memiliki tiga prinsip utama: keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, organisasi diatur secara demokratis, dan kemandirian. Kriteria desa wisata adalah daya tarik, aksesibilitas, ruang publik dan pelayanan wisata, pemberdayaan masyarakat dan pemasaran atau promosi. Dari lima kriteria desa wisata di Desa Paledah, hanya dua yang berjalan optimal, yaitu destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat. Masih ada masalah dengan tiga kriteria lainnya. Hambatan utama penerapan ketiga kriteria tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia dan anggaran.[49] Penelitian tersebut memiliki persamaan pada subyek penelitian yaitu pemerintah, pengelola dan pelaku usaha di desa wisata. Sedangkan perbedaanya terletak kepada fokus penelitian dimana penelitian

[48] Skripsi, T. Popon Yuliansyaf, *"Analisis Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Pada Desa Wisata Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, 2021

[49] Neneng Komariah, Encang Saepudin, Pawit M. Yusup,. *"Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal".* Jurnal Pariwisata Pesona Volume 03 No 2, Desember 2018: 173

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tersebut terfokus kepada strategi pengembangan desa wisata, sedangkan dalam penelitian ini hanya terfokus kepada dampak adanya pengelolaan wisata religi terhadap masyarakat serta faktor pendukung dan penghambatnya.

C. Kerangka Berfikir

Pengembangan wisata religi ini memerlukan perhatian khusus dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah kota, pengelola wisata dan pengelola desa. Kerjasama yang baik antara pemerintah kota, pengelola pariwisata dan pengelola desa diperlukan agar pembangunan wisata religi dapat berhasil dan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu dari tiga hal yang sangat perlu dikembangkan oleh desa wisata ini. Bagaimanapun, pengembangan wisata rfeligi ini akan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, sehingga keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Potensi Desa Colo seperti panorama desa, pertanian, peternakan, sarana outbond, seni dan budaya memungkinkan untuk dapat dijadikan produk wisata di Desa Colo untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengelola Desa Wisata Colo telah menghasilkan peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat seperti mulai maraknya wisata baru berbasis ekowisata dan eduwisata serta produk- produk UMKM unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kerangka berpikir seperti ini:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

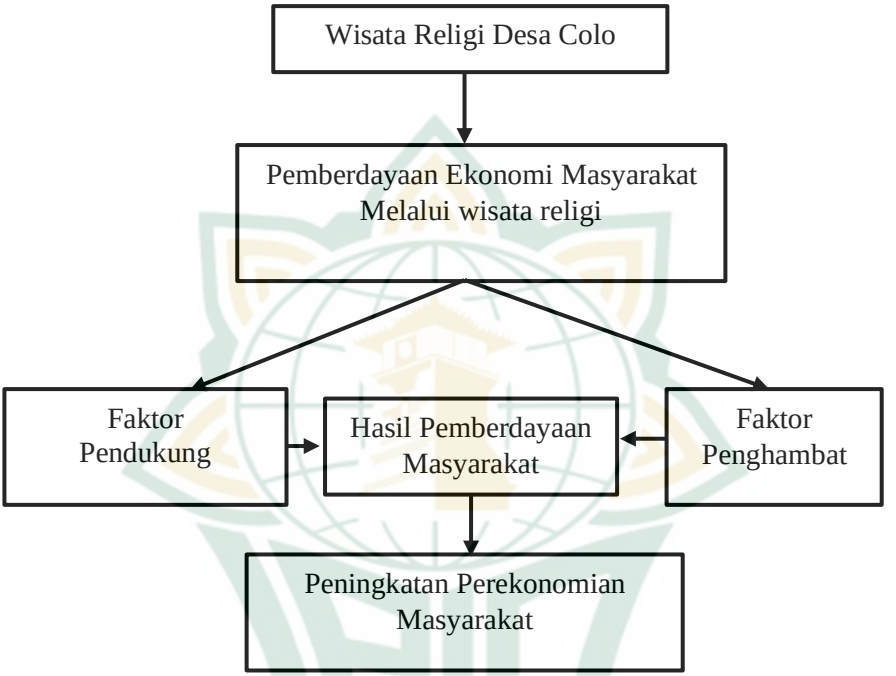

REPOSITORI IAIN KUDUS